

**MODEL AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DESA BERBASIS *SHARIATE ENTERPRISE THEORY***

Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, Adi Listiono, Lilis Mardiana, Hartono
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang Jl Prof Sudharto SH
Tembalang Semarang

nikmatuniayah@rocketmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berbasis *Shariate Enterprise Theory*. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk membedah faktor faktor akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa berdasarkan: spritual, ekologi, ekonomi dan sosial. Pada Tahun kedua penelitian dilanjutkan untuk merancang model *Good Governance* Lini desa berbasis mutual *Shariate Enterprise Theory*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Moleong (2005), yaitu menggunakan metode penelitian *pragmatic*. Pengembangan model akuntabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Shariate Enterprise Theory*. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menganalisis dokumen, pengamatan, wawancara, survey dan eksplorasi. Penelitian ini telah mengidentifikasi indikator model akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset. Akuntabilitas pada proses penentuan indikator ini akan dibagi menjadi empat dimensi, yaitu : dimensi Akuntabilitas manusia dengan masyarakat; Akuntabilitas manusia dengan negara; Akuntabilitas manusia dengan alam; Akuntabilitas manusia dengan Allah SWT. Untuk penelitian berikutnya dapat dilanjutkan dengan teori yang lain, semisal teori etika kerja islam yang merupakan teori Islam yang sering dipakai.

Kata kunci :akuntabilitas, pengelolaan keuangan dan aset desa, *shariate enterprise theory*

Abstract

This study aims to formulate a Model of Accountability in Financial Management and Village Assets based on Shariate Enterprise Theory. Specifically, this study aims to dissect the accountability factors of financial management and village assets based on: spiritual, ecological, economic and social. In the second year, the study continued to design a model of Good Governance Village Lines based on Mutual Enterprise Theory. This research method uses the qualitative approach of Moleong (2005), which uses the pragmatic research method. The development of accountability models in this study uses Shariate Enterprise Theory. A qualitative approach is carried out by analyzing documents, observations, interviews, surveys and exploration. This research has identified indicators of accountability models for financial and asset management. Accountability in the process of determining this indicator will be divided into four dimensions, namely: the dimension of Accountability between humans and society; Human accountability to the state; Human accountability to nature; Human accountability with Allah. For further research, it can be followed by other theories, such as the theory of Islamic work ethics which is an Islamic theory that is often used.

Keywords: accountability, village financial and asset management, shariate enterprise theory

PENDAHULUAN

Sebagai pertanggungjawaban laporan keuangan kepada pemerintah, perangkat desa harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu cara untuk mengimplementasikan pengelolaan tersebut dengan menerapkan sistem informasi yang berbasis *Good Financial Governance* (GFG). Prinsip GFG ini meliputi: Akuntabilitas berdasar hasil dan kerja, Transparansi dalam setiap transaksi keuangan, pemberdayaan manajer profesional, dan adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri (Amerieska, Siti 2015). Akuntabilitas yang merupakan salah satu unsur GFG, sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Prinsip GFG ini meliputi: Akuntabilitas berdasar hasil dan kerja, Transparansi dalam setiap transaksi keuangan, pemberdayaan manajer profesional, dan adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri.

Sehubungan dengan akuntabilitas tersebut berdasarkan faktor ekonomi, akuntansi merupakan media pertanggungjawaban, yaitu suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan informasi dalam rangka pertanggungjawaban (akuntabilitas). Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pelayanan publik, Gray. R (2002). Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan dan aset desa menuntut kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang selalu berubah. Kondisi lingkungan yang strategis adalah yang mau dan berusaha untuk menjawab tantangan zaman, (keterbatasan sumber daya masyarakat yang semakin tumbuh dan berkembang untuk dimanfaatkan, keterbukaan/transparansi pengelolaan keuangan dan aset, akuntabilitas dalam laporan keuangan yang disajikan). Meskipun dengan berkembangnya jaman adanya *good corporate governance*, namun sayang kontribusi yang diberikan masih ada muatan kepentingan utilitarianisme (kepentingan individu atau kelompok didahulukan). **Penekanan masalah pada penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan dan aset desa. Akuntabilitas dalam hal ini akan dibingkai dengan *shariate enterprise theory*, Triyuwono (200b) untuk memberi alternatif pilihan yang pada tujuannya memberikan keselarasan dan harmoni bagi kepentingan *stakeholder* (pemerintah, masyarakat desa, aparat desa) secara keseluruhan. Untuk pengembangan lebih lanjut di Tahun 2 perlu dilanjutkan penelitian untuk mendesain model Good Governance Lini desa berbasis mutual *Shariate Enterprise Theory*.**

Entity theory yang menjadi konsep akuntansi modern sarat dengan nilai *egoisme*. *Entity theori* didasari oleh nilai kapitalisme dan *utilitarianisme*. Kapitalisme dan *egoisme* mendorong ekonom bertindak serakah dan mengesampingkan kepentingan publik. Padahal pengelolaan keuangan dan aset desa bukanlah bisnis komersial, melainkan pelayanan untuk kesejahteraan umum. *Shariate Enterprise*

Theory adalah alternatif model akuntabilitas yang mempertimbangkan lingkungan kepentingan umum, berdasarkan ketuhanan, kejujuran dan keadilan manusia. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana memformulasikan model akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan *Shariate Enterprise Theory*? Pertanyaan ini dianalisis dengan mengkaji pengelolaan keuangan dan aset desa: Desa Mluweh dan Desa Kalikayen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Kedua desa tersebut dipilih sebagai *pilot project* dengan ketentuan termasuk desa agraris dan mayoritas beragama Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan bentuk keharusan seseorang (pimpinan) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya pemerintah daerah (*desa*) harus mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

Pengelolaan keuangan dan aset desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa yaitu: laporan pertanggungjawaban APBDesa, laporan pertanggungjawaban Dana Desa, Laporan pertanggungjawaban Alokasi dana Desa, dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan. Pengelolaan keuangan desa mencakup:

- (1) Perencanaan (penyusunan) APBDES: pendapatan dan belanja.
- (2) Pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain.

Tabel 2. Bidang utama yang dibiayai keuangan desa

No	Bidang	Unsur-unsur
1	Pemerintahan	Gaji pamong desa; perlengkapan dan operasional kantor; perawatan kantor desa; pajak listrik; perjalanan dinas; jamuan tamu, musyawarah; sidang BPD; gaji BPD (kalau ada); langganan media; dll. Yang perlu dipikirkan: biaya peningkatan SDM, pendataan desa; publikasi desa; papan informasi dan lain-lain.
2	Pembangunan	Prasarana fisik desa; perawatan; ekonomi produktif, pertanian dan lain-lain
3	Kemasyarakatan	Kegiatan LKMD, pemberdayaan PKK, pembinaan muda-mudi, kelompok tani, keagamaan, penanganan kenakalan remaja, dan lain-lain.

Sumber: Amerieska, Siti 2015

Penatausahaan Keuangan: Penerimaan dan Pengeluaran Kas

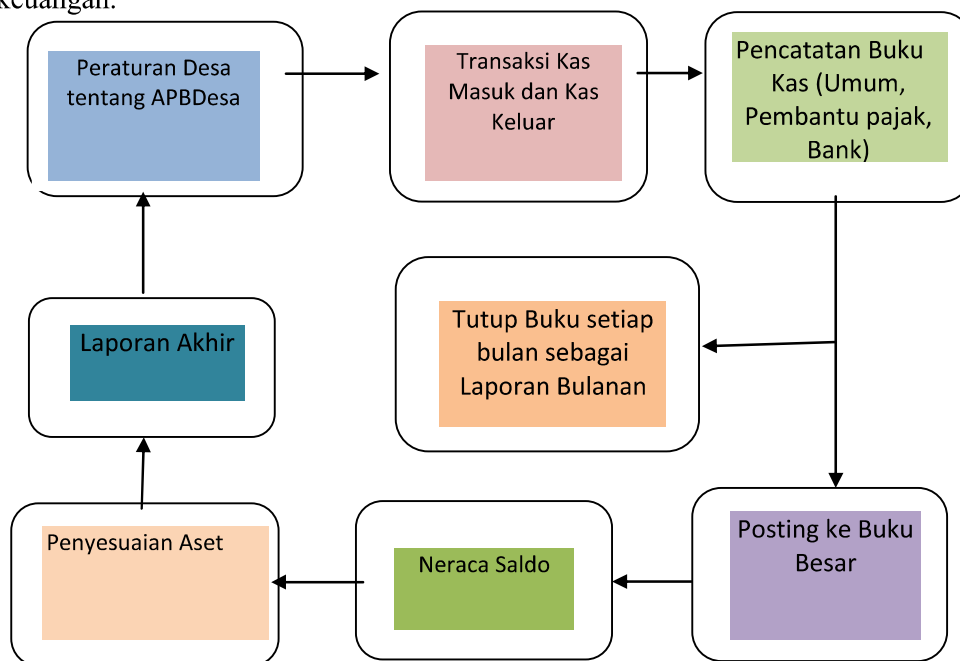
Penerimaan kas oleh pemerintah desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dapat berupa pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain, ataupun yang bersumber dari penerimaan pembiayaan. Sementara pengeluaran kas oleh pemerintah desa dapat berupa belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, bidang tak terduga atau untuk pengeluaran biaya.

Sistem informasi akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas memberikan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan oleh manajemen. Penyusunan Laporan Keuangan (*financial statement*) Desa melibatkan beberapa aktivitas sebagai berikut (Yuliansyah & Rusmianto, 2015):

1. Siklus penatausahaan keuangan desa dimulai dengan ditetapkannya peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Berdasarkan APBDesa pemerintahan desa melakukan transaksi keuangan berupa penerimaan kas sebagai sumber pendapatan desa dan melakukan

pengeluaran kas berupa belanja untuk menjalankan operasional dan program desa.

3. Berdasarkan bukti-bukti transaksi keuangan yang syah terutama Surat Permintaan Pembayaran dan Bukti penerimaan kas, bendahara desa mencatat dalam buku-buku kas (buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank).
4. Bendahara desa memposting buku kas ke masing-masing rekening di buku besar. Bendahara desa menyusun neraca saldo yang merupakan ringkasan saldo dari setiap rekening di buku besar.
5. Selanjutnya bendahara desa menghitung dan melakukan penyesuaian terhadap rekening-rekening yang terkait dengan aset lancar sebagai tahap penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa. Pamungkas Bendahara desa menyusun laporan keuangan.



Gambar 1. Siklus Penatausahaan Keuangan Desa
Sumber: Permendagri No 113 Tahun 2014

Akuntabilitas Syariate Enterprise Theory

Dalam pandangan *entity theory income* menjadi informasi yang penting bagi pemilik yang didasari nilai *kapitalisme* dan *utilitarianime*. Menurut pandangan

teori tersebut perusahaan akan eksis jika dapat menghasilkan *income*, dan *income* semata mata diperuntukkan bagi pemilik, sebagai bentuk *kapitalisme*. Sesuai dengan tujuan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset desa, teori yang tepat adalah *shariate enterprise theory* digunakan untuk menganalisis bentuk akuntabilitas ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam aspek aspek akuntabilitas, yaitu spiritual, ekologi, ekonomi dan sosial. Berikut keempat faham dapat digunakan untuk memahami bagaimana akuntabilitas yang didasarkan pada fenomena yang ada.

Tabel 3. Perbedaan Teori Teori Entitas

Keterangan	Entity Theory	Stakeholder Theory	Enterprise Theory	Shariate Enterprise Theory
1.Tujuan	Tujuan perusahaan memaksimalkan kepentingan pemilik	Tujuan akhir dari adanya pengungkapan sosial adalah profit maksimum yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan pemilik	Tujuan menekankan aspek sosial dan pertanggungjawaban. Pusat perhatian adalah keseluruhan pihak yang terlibat atau yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung perusahaan.	Sama dengan <i>Enterprise Theory</i> namun ada internalisasi nilai tauhid
2.Nilai dianut	<i>Kapitalisme</i> dan <i>utilitarianisme</i>	<i>Sosialis</i> dan <i>utilitarianisme</i>	<i>Sosialis</i> dan <i>Utilitarianisme</i>	Tauhid, Etika, Syariah
3.Fokus Kepentingan	Pemilik	<i>Direct Stakeholder</i>	<i>Direct Stakeholder</i>	<i>Tuhan, Direct dan Indirect, Stakeholder, alam</i>

Sumber: Amerieska, Siti (2015)

Nilai nilai yang terkandung dalam *syariate Enterprise Theory* yakni nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban.

Nilai Keadilan

Keadilan merupakan pondasi terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang

diutus Allah (QS.57:25), termasuk penegakkan keadilan ekonomi (QS. An Nisa:135).

Dilihat dari *Enterprise theory*(ET) perusahaan dipandang tidak hanya sebagai institusi bisnis, melainkan sebagai institusi sosial yang mempunyai konsekuensi bagi perusahaan untuk memenuhi tuntutan sosial. Karena bagi *Entity Theory* laba merupakan hasil usaha bersama para partisipan/*stakeholder* (pemegang saham, kreditor, karyawan dan masyarakat)

Nilai Kebenaran

Menurut Zulkifli dan Sulastiningsih (1998:172), bahwa secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam QS 2;282 Allah SWT memerintahkan agar umat mencatat muamalah yang mengakibatkan perubahan dalam aset perorangan atau organisasi. Muamalah merupakan bagian penting dari ekonomi umat, sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan nilai nilai Islam.
2. Bukti transaksi sebagai dasar pencatatan, bukan terjadinya muamalah harus bebas dari penipuan, sehingga perlu adanya persaksian dari pihak kompeten (QA 2: 282), sehingga bukti itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan demikian tidak ada satu transaksi pun dilupakan walaupun sebesar zarah (QS Al Zalzalah 7-8).
3. Menurut akuntansi Islam harus lebih menekankan pada kenyataan, bukan sekedar menyandarkan pada bukti formal.
4. Agar informasi kepentingan dapat dipercaya, maka informasi tersebut harus diuji kebenarannya oleh pihak independen (QS. An Nisa: 155).

Nilai Kejujuran

Kejujuran dapat dikatakan sebagai modal dasar seseorang dalam lingkungan sosialnya, karena dengan adanya kejujuran tersebut berarti orang tersebut telah menghargai dirinya. Perintah untuk berlaku jujur ini sesuai dengan Firman Allah SWT, QS 33:70, Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bisnis wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jadi simpulannya

kejujuran merupakan nilai moral yang mendasar untuk menggapai ridho Allah dalam praktek muamalah.

Amanah

Amanah merupakan perilaku yang wajib dimiliki oleh insan kehidupan dalam ajaran Islam tertinggi (QS 33:72). Ayat menjelaskan beratnya amanah dan beban yang harus ditanggung oleh manusia, dimana langit, bumi dan gunung sebagai makhluk Allah yang perkasa dan kuat merasa lemah dan enggan untuk memikul amanah itu, takut dan khawatir jikalau tidak sanggup menunaikannya.

Akuntabilitas *Syariate Enterprise Theory*(SET) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Mengemban tugas/amanah dengan segala keikhlasan dalam menjalankan.
2. Mementingkan kepentingan *direct* and *indirect stakeholder* serta alam.
3. Menjunjung etika bisnis yang Islami (halal haram).

Akuntabilitas SET merupakan akuntabilitas bersifat holistik karena meliputi dimensi hubungan manusia dengan Tuhan (akuntabilitas spritual), dimensi hubungan manusia dengan lingkungan alam (akuntabilitas ekologi), dan dimensi hubungan manusia dengan sesama manusia (akuntabilitas ekologi), dan dimensi hubungan manusia dengan sesama manusia (akuntabilitas ekonomi dan akuntabilitas sosial). Dalam gambar juga terlihat bahwa dalam dimensi hubungan akuntabilitas meliputi berbagai macam aspek aspek baik spiritual, yang berlaku hubungan manusia dengan Tuhan. Manifestasi akuntabilitas spritual ini didasari, bahwa segala aktivitas yang dilakukan adalah suatu bentuk ibadah, dan amal kepadanya.

METODE PENELITIAN

Model Pengembangan

Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Moleong (2005), dimana menggunakan metode penelitian *pragmatic*. Pendekatan

pragmatic ini bagaimana mengintegrasikan teori kedalam praktik, sehingga hasil yang dicapai memberikan pengembangan serta memperbaiki praktik yang ada, Muhajir (2000). Pengembangan model akuntabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Shariate Enterprise Theory*. Pendekatan kualitatif dilakukan dalam hal melakukan dokumen, penghematan wawancara, survey dan eksplorasi serta *focus group discussion*. Penelitian terdahulu dilakukan untuk mengidentifikasi pandangan praktisi serta keunggulan pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel. Sintaks dan skenario *design* model akuntabilitas memuat lima nuansaistik dasar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Karakteristik Dasar *Design Based Research*

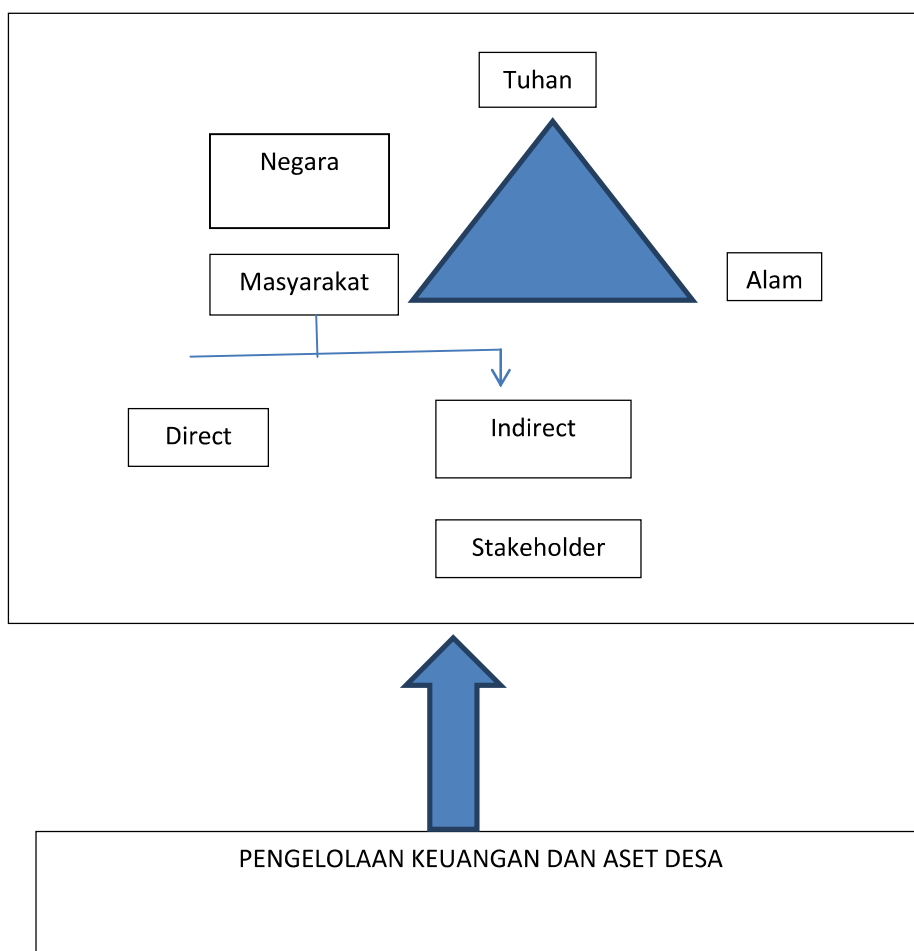
No	Karakteristik	Uraian Penjelasan
1	<i>Pragmatic</i>	-Sebagai riset pengembangan berbasis <i>design</i> yang memperhalus antara teori dan praktik -Nilai dari teori diungkap berdasar prinsip prinsip yang terkandung di dalamnya sehingga sejauh mana dapat diperbaiki dalam praktik
2	<i>Grounded</i>	-Desain yang dikembangkan dipicu oleh teori dan digroundedkan dalam riset yang relevan serta teori dan praktik. -Desain disusun dengan melihat realita dan prosesnya dikaji melalui riset berbasis desain.
3	<i>Interactive, Iterative dan Flexible</i>	-Proses perancangan design yang melibatkan antara penyusun dan praktisioner -Prosesnya disusun dengan siklus interaktif, desain, implementasi dan redesain -Memiliki perencanaan awal yang cukup dan memungkinkan designer melakukan perubahan jika diperlukan.
4	<i>Integrative</i>	-Bauran metode riset dilakukan guna memaksimalkan kredibilitas riset -Metode bervariasi selama fase fase pengembangan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan isu yang relevan Kelugasan dan disiplin dijaga dengan tujuan dapat memberikan bentuk yang sesuai pada fase pengembangan -Kelugasan dan disiplin dijaga dengan tujuan dapat memberikan bentuk yang sesuai pada fase pengembangan
5	<i>Contextual</i>	-Mendokumentasikan proses riset dari temuan

		hingga perubahan yang terjadi mulai dari perencanaan awal. -Hasil riset dikaitkan dengan proses desain dan settingnya -Isi dan kedalaman desain yang tergenerasi beragam -Diperlukan panduan untuk menerapkan prinsip prinsip yang sudah digenerasikan.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Amerieska, Siti 2015

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sebagai pilot project penelitian adalah Desa Mluweh dan Desa Kalikayen yang merupakan desa berpenduduk agraris mayoritas beragama Islam.



Gambar 3. Model Penelitian Akuntabilitas Shariate Enterprise Theory

Sumber : Modifikasi dari Amerieska, Siti (2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory

Pengelolaan keuangan dan aset desa yang didasarkan peraturan pemerintah dapat disinergikan dengan basis shariate Islam yang menjalankan keuangan desa. Basis shariate Islam tidak terlepas da implementasi yang namanya akhlak. akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang yang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan (Purwanto dan Pramono, 2006). Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama, maka tindakan itu disebut akhlak yang baik atau akhlakhul karimah. Sebaliknya, akhlak yang buruk disebut akhlak mazmumah. Baik dan buruk akhlak didasarkan kepada sumber nilai, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa bentuk akuntabilitas ini diapresiasi dengan dipraktekannya prinsip-prinsip etika syariah berdasarkan akhlak yang bersumber Al-Qur'an dan Sunah Rasul.

Sedangkan pada tingkat tiga, akuntabilitas manajemen desa berupa pertanggungjawaban kepada Tuhan. Bentuk akuntabilitas pada tingkat ini tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan apresiasi terhadap pengamalan nilai-nilai akhlak Islam yang diperankan oleh manajemen LAZ. Implementasi pertanggungjawaban kepada Tuhan dapat dilihat dari rasa nyaman, ilkhlas, dan amal pengelola LAZ. Indikator tersebut tidak dapat dilihat secara kasat mata, melainkan kepercayaan publik yang diberikan kepada manajemen LAZ itu sendiri.

Berikut tabel yang menjelaskan sinergi akuntabilitas dengan dimensi nilai ketuhanan secara umum, yang kemudian dibandingkan dengan basis Shariate Enterprise Theory.

Tabel 5. Dimensi Nilai dalam Ruang Lingkup Akuntansi

Dimensi Nilai	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan & Aset Desa berdasarkan UU No 6 2014	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan & Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory
Keadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan Komunikatif: 10 % dari hasil penerimaan pajak/retribusi daerah di desa bersangkutan . 2. Keadilan Distributif : 10% dari total penerimaan pajak retribusi daerah dibagi secara merata untuk desa. 	Berdasar prinsip humanis, emansipatoris tentang menjalankan hak dan kewajiban, pemerataan kesempatan yang sama dalam pemanfaatan hasil pajak atau retribusi secara merata.
Kebenaran	<p>Penerapan basis pola alokasi dana desa dengan kebenaran berdasarkan penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Dana Desa minimal: 60% total ADD dibagi secara merata keseluruhan. 2. Alokasi Dana desa proposional: 40% total ADD dibagi untuk desa-desa tertentu 	Aktivitas yang sesuai dengan seharusnya, dimana pengalokasian Dana Desa yang sesuai ketentuan kebijakan pengalokasian. Prinsip Transidental digunakan dalam hal ini sebagai kontrol aparatur desa yang menjalankan fungsi pengelola dimana setiap aktivitas diawasi oleh Allah SWT
Kejujuran	Prinsip <i>Money Follow Function</i> Sinergitas kewenangan desa atas hak asal usul desa, tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi/kabupaten/kota dan urusan pemerintah lainnya yang diserahkan desa terhadap fungsi sumber-sumber dana yang dikelola desa.	Kejujuran merupakan komitmen dari perilaku yang seiring dengan perkataan ataupun informasi yang disampaikan, dimana komitmen kejujuran dalam SET berlandaskan prinsip Transidental dan Teleologikal
Amanah	Pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa sesuai prinsip Adil, Transparan & Akuntabel untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat desa : <ol style="list-style-type: none"> 1. 30% penggunaan ADD untuk biaya operasional 	Prinsip Teleologikal Amanah dalam pengelolaan keuangan dan aset desa tidak semata dipertanggungjawabkan dihadapan manusia semata, namun juga dipertanggungjawabkan

	2. 70% penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat	kepada Allah SWT.
--	-----------------------------------------------------	-------------------

Berdasarkan prinsip humanis, emansipatoris aparat desa menjalankan hak dan kewajiban, pemerataan kesempatan yang sama dalam pemanfaatan sumber daya masyarakat desa. Dalam hal pemanfaatan hasil pajak atau retribusi daerah secara merata. Banyak sumber daya yang dimanfaatkan secara bersama seperti air sendang dan fasilitas umum secara merata. Prinsip Transidental digunakan dalam hal ini sebagai kontrol aparatur desa. Dalam implementasi prinsip ini ditanamkan, bahwa setiap aktivitas diawasi oleh Tuhan YME. Seperti di Desa Kalikayen, pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan secara serentak. Semua aparat desa berangkat sholat Jumat dan meninggalkan tugas masing-masing.

Kejujuran merupakan komitmen dari perilaku yang seiring dengan perkataan ataupun informasi yang disampaikan, dimana komitmen kejujuran dalam *Syariate Enterprise Theory* berlandaskan prinsip transidental dan teleologikal. Di sini Kepala Desa sangat menekankan kejujuran dalam menjalankan tugas. Pencairan dana desa harus melewati tiga pintu: Kepala Desa, Bendahara, dan Sekretaris Desa. Waktu pemegangan Kas hanya 24 Jam, selebihnya harus disimpan di Kas Desa (Bank). Pembagian dana yang dibagikan untuk dana operasional DPD Desa harus dipertanggungjawabkan SPJ nya.

Prinsip Teleologikal amanah dalam pengelolaan keuangan dan aset desa tidak semata dipertanggungjawabkan di hadapan manusia juga dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Para pengelola Dana Desa ditanamkan, bahwa pertanggungjawaban laporan tidak hanya pada pemerintah kabupaten ataupun pusat, melainkan pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pengawas perilaku akhlak pemerintah desa.

Indikator Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan Syariate Enterprise Theory

Selanjutnya langkah mengidentifikasi indikator model akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset. Akuntabilitas pada proses penentuan indikator ini akan dibagi menjadi empat dimensi, yaitu : dimensi Akuntabilitas manusia dengan masyarakat; Akuntabilitas manusia dengan negara; Akuntabilitas manusia dengan alam; Akuntabilitas manusia dengan Allah SWT.

Tabel 6. Indikator Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan Shariate Enterprise Theory

Dimensi Hubungan Akuntabilitas	Jenis Akuntabilitas	Aspek Akuntabilitas	Indikator
Manusia dengan Masyarakat	Akuntabilitas Ekonomi	Fisik	Kinerja Ekonomi: Efektifitas dan efisiensi penyerapan dana desa (pengukuran berdasar <i>value for money</i>)
		Mental	Kepuasan masyarakat akan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (rasa solidaritas yang tinggi, empati, kasih sayang, keikhlasan, kepercayaan) bersama membangun desa secara syariah.
	Akuntabilitas Ekologi	Fisik	Kontribusi sebesar atas surplus APBDesa yang dialokasikan untuk dana sosial.
		Mental	Rasa soidaritas berbagi rizki kepada sesama (empati, gotong royong)
Manusia dengan negara	Akuntabilitas Publik	Fisik	Program –program pembangunan pelayanan umum, sekolah paud, dan fasilitas publik dijalankan dengan amanah.

		Mental	Rasa tanggung jawab kepada pemerintah menjadi mental pembangunan desa.
Manusia dengan alam	Akuntabilitas Ekologi	Fisik	Program-program pelestarian lingkungan dengan sanitasi sesuai standar kesehatan, Program penanaman kebun pisang atau produk unggulan.
		Mental	Menanamkan rasa cinta kebersihan dan sanitasi rumah tangga dan lingkungan desa.
Manusia dengan Allah SWT	Akuntabilitas Spiritual	Fisik	Program-program yang digulirkan desa bermanfaat untuk membentuk masyarakat dan aparatur desa yang memiliki jiwa spiritual yang baik ESQ, Quantum Spiritual, dan Manajemen Qolbu dll.
		Mental	Iman- Islam- ihsan

Hubungan manusia dengan masyarakat merupakan suatu rajutan ukhuwah, yang saling berketergantungan. Bila dikaitkan dengan akuntabilitas ekonomi manifestasi rajutan ukhuwah itu adalah hubungan kemitraan untuk saling membantu dalam urusan kegiatan pembangunan desa. Implikasi ekonomi langsung ataupun tidak langsung suatu desa terhadap masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja ekonomi. Kepedulian terhadap implikasi ekonomi keberadaan desa terhadap masyarakatnya merupakan bentuk akuntabilitas ekonomi desa.

Akuntabilitas ekologi desa, dapat berupa Program-program pelestarian lingkungan dengan sanitasi sesuai standar kesehatan, Program penanaman kebun pisang atau produk unggulan. Bila dihubungkan dengan prinsip-prinsip SET, humanisme terhadap alam yang dilakukan desa dapat berupa gerakan jentik, sebagai implementasi hadist Nabi,” Kebersihan adalah sebagian dari iman.”

Akuntabilitas publik merupakan pengejawantahan dari Program –program pembangunan pelayanan umum, sekolah paud, dan fasilitas publik dijalankan

dengan amanah. Kegiatan ini diniati dengan rasa tanggung jawab kepada pemerintah kabupaten dan pusat. Program-program pembangunan fasilitas publik ini mengacu pada anggaran dan dilaksanakan sesuai perencanaan, serta dipertanggungjawabkan SPJnya secara tanggung jawab. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat tiga kali dalam setahun-tri wulan.

Akuntabilitas spiritual merupakan bentuk pertanggungjawaban individu kepada Tuhannya, yaitu Allah SWT. Rasa tanggung jawab ini diwujudkan dengan sikap bekerja giat dan beryukur kepada Allah SWT. Aparat Desa bekerja sungguh-sungguh meski tidak dilihat Pak Kades, karena bagi mereka pertanggungjawab itu ditujukan langsung kepada Allah SWT. Spritualisme di sini juga diwujudkan dengan bentuk syukur ke hadirat Allah SWT baik individu maupun masyarakat desa. Rasa syukur yang dinobatkan masyarakat desa diwujudkan dengan kegiatan sedekah bumi yang dilaksanakan setahun sekali. Di sini rasa syukur diisi dengan tanggapan wayang, doa bersama, dan makan bersama warga.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengidentifikasi indikator model akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset. Akuntabilitas pada proses penentuan indikator ini akan dibagi menjadi empat dimensi, yaitu : dimensi Akuntabilitas manusia dengan masyarakat; Akuntabilitas manusia dengan negara; Akuntabilitas manusia dengan alam; Akuntabilitas manusia dengan Allah SWT.

Akuntabilitas manusia dengan masyarakat diwujudkan dengan pemerataan yang sama dalam pemanfaatan sumber daya masyarakat desa. Akuntabilitas manusia dengan Negara diwujudkan dengan Laporan Keuangan &Aset DESa per triwulan. Akuntabilitas manusia dengan alam sebagai bentuk kegiatan pelestarian

lingkungan alam. Sedangkan akuntabilitas terhadap Allah SWT diwujudkan dengan rasa syukur dan sedelah bumi.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pengumpulan data wawancara yang masih kurang. Pelaksanaan wawancara dilakukan terbatas pada petugas yang berwenang, dan ini sulit diagendakan mengingat kesibukan aparat desa, terutama menjelang deadline laporan keuangan desa. Untuk penelitian berikutnya dapat dilanjutkan dengan teori yang lain, semisal teori etika kerja islam yang merupakan teori Islam yang sering dipakai.

REFERENSI

- Andayani, W. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Adhiani, Budhi. 2015. Pengukuran Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Bidang Akademik tahun 2013 Politeknik Negeri Semarang. Laporan penelitian terapan Politeknik Negeri Semarang tidak dipublikasikan.
- Amerieska, Siti. 2015. Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis *Shariate Enterprise Theory*. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gray, Rob, David L. Owen, Keith Mounders. 1991. Accountability, Corporate Social Reporting and the Social Audit. *Journal of Business, Finance, and Accounting (spring)*, pp: 39-50.
- Handayani, Rini. 2010. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Sistem Informasi pada Organisasi Sektor Pulik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 12, No 1, Mei , Hal: 26-40.
- Handajani, Lilik. 2010. Menggagas “Akuntansi Publik Terintegrasi” pada Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 1 No 1 April, Hal 121-140
- Krismiaji. 2010. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Penerbit YKPN
- Nikmatuniyah. 2014. Model Etika Profesi Pelayanan Prima Aparat Kelurahan dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. Politeknik Negeri Semarang
- _____.2018. Model Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Semarang Berbasis SAP

**Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
Polines - 2019**

- Padmodiningrat, Sumaryoto. 2013. Korupsi dan Kemiskinan di Jateng. Suara Merdeka, Selasa 24 September 2013.
- _____. 2014. Embrio Korupsi Masuk Desa. Suara Merdeka, Kamis 2 Januari 2014.
- Setyoko, I Paulus. 2011. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 11, No. 1, Januari, Hal: 14-24
- Sujarweni, Wiratna. V. 2015. Akuntansi Sektor Publik: Teori Konsep Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- _____. 2015. Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa
- Yuliansyah & Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat